

OPTIMALISASI STRATEGI KOMPARTEMENTASI WILAYAH PERTAHANAN PADA KOREM 121/ABW, KALIMANTAN BARAT

Soetomo Sakijo Admodjo*)

Kondisi geografis suatu negara adalah faktor utama untuk dapat menentukan bagaimana bangsa itu mempersiapkan dan mendesain sistem pertahanan negaranya, sehingga mampu menangkal segala bentuk ancaman terutama ancaman militer yang berupa invasi, agresi atau infiltrasi. Di dunia ini paling tidak ada tiga kategori bentuk negara bila ditinjau dari aspek geografis maupun topografis. Pertama, bentuk negara yang bersifat continental solid country, yaitu negara yang berupa seluruhnya daratan solid seperti Swiss, Mongolia, dan lain-lain. Kedua, negara yang bersifat coastal country, seperti negara pantai Chile, Argentina, dan lain-lain. Ketiga, negara yang bersifat archipelago country (negara kepulauan yang bisa memanjang, melingkar, atau mengelompok dan dikelilingi lautan seperti Jepang, Philipina dan lain-lain). Indonesia termasuk negara kepulauan yang melebar dan memanjang dari Sabang hingga Merauke.

Negara Kepulauan Indonesia disebut pula sebagai "Benua Kepulauan" yang konon dikategorikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*The Encyclopedia of Britanica*, 1974). Mempertahankan negara kepulauan, walaupun banyak pilihan strategi dan taktik, akan lebih sulit bila dibandingkan dengan

negara yang bersifat daratan solid, sebab kemungkinan corong dan celah yang dapat digunakan sebagai jalan pendekat bagi lawan relatif terbuka. Kajian yang mendalam baik secara teoritik maupun empirik dibutuhkan untuk menentukan pilihan strategi yang tepat bagi Indonesia.

Dengan dilandasi UUD RI

*) Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

1945 pasal 30 ayat 2 yakni: "usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung", maka implementasi Sishankamrata akan jauh lebih efektif dan handal apabila dapat diterapkan konsepsi strategi kompartementasi wilayah.

Strategi pembangunan komando pertahanan kewilayahan seperti yang ada sekarang masih perlu disempurnakan menjadi komando wilayah pertahanan atau komando daerah militer yang diperkuat dan disebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan selama bangsa Indonesia belum memiliki kemampuan yang cukup seperti negara-negara maju untuk dapat memproyeksikan kekuatan TNI ke seluruh wilayah tanah air dengan tanggap, cepat dan efektif.

Pemahaman tentang kompartementasi wilayah pertahanan pada hakikatnya adalah suatu cara mempertahankan negara dengan membagi wilayah nasional secara strategis ke dalam komando-komando pertahanan di daerah, di bawah kepemimpinan komando tertinggi di tingkat nasional.

Paling tidak terdapat dua faktor yang mempengaruhi pandangan dan perbedaan cara berfikir orang yang berkembang akhir-akhir ini tentang keberadaan Koter. Pertama, faktor eforia reformasi yang berlebihan, yang cenderung tak terkendali. Kedua, pengadopsian sistem demokrasi yang dilematis dalam mencari bentuk yang cocok di Indonesia. Ada anggapan bahwa di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara demokrasi lainnya (Saldi Isro', 2008). Sistem demokrasi itu sendiri tentu tidak salah; bahkan sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia untuk memilih sistem ketatanegaraan yang demokratis dan meninggalkan sistem ketatanegaraan yang otokratis, seperti yang dianut orde baru di masa lalu. Namun, reformasi haruslah kembali pada hakikatnya, yakni mengganti yang salah, memperbaiki yang keliru dan lebih menyempurnakan yang sudah baik. Semua tidak perlu dimusnahkan dan diganti dengan yang baru, karena sistem yang baru itupun belum diuji keandalannya. Reformasi di tubuh Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah dilakukan sejak keluarnya TAP MPR No. VI dan No. VII tahun 2000 dengan dimulainya pemisahan institusi TNI dan Polri. Kedua aparat ini dikembali-

kan kepada proporsionalitas dengan profesionalisme masing-masing fungsi.

Secara umum, TNI difungsikan sebagai instrumen negara yang berperan dalam bidang pertahanan negara dan Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan penegakan hukum. Bertolak dari tataran perundang-undangan, reformasi Sistem Pertahanan Negara dan kedudukan TNI/Polri dikukuhkan dengan Undang-undang No. 3/Th. 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 2/Th. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 34/Th 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernah terjadi perdebatan yang cukup keras tentang pasal 8 dan pasal 11 dalam RUU tentang TNI, antara lain yang datang dari sebagian elit politik dan kelompok masyarakat yang mengkhawatirkan keberadaan TNI di jajaran komando kewilayahan atau dikenal sebagai komando teritorial (Koter). Koter tersebut yaitu, Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) sampai dengan Komando Rayon Militer (Koramil) dan Babinsa (Bintara Pembina Desa).

Di masyarakat, perdebatan

itupun semakin meluas. Media masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Non Government Organisation* (NGO) serta beberapa anggota DPR RI terus mempersoalkan keberadaan Koter (Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa) sebagai lembaga TNI-AD di semua daerah yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Menurut pendapat Harold Crouch, bahwa munculnya istilah pembinaan teritorial dalam RUU TNI saat itu dinilai merupakan salah satu alat strategi TNI yang ingin kembali memperluas dan membangun hegemoni di domain politik, sampai ke tingkat yang paling rendah yaitu kelurahan atau desa. Hal ini termasuk salah satu bentuk *politicking* TNI. TNI yang katanya sudah mereformasi diri tetapi nyatanya tidak ada perubahan dan masih seperti zaman orde baru. Menurut Crouch, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan kekuatan udara dan laut yang kuat, untuk kepentingan pertahanan. Artinya, ancaman terhadap Indonesia tidak saja berasal dari darat tetapi juga dari laut dan udara (Harold Crouch, ANU, 2004).

Agus Widjoyo berpendapat bahwa peran apa pun yang diberikan kepada TNI haruslah konsisten dengan amanat konstitusi, yakni sebagai instrumen pertahanan nasional. Bila ko-

mando teritorial (Koter) diberikan peran dan kemampuan dalam fungsi pertahanan, maka dapat dilihat sebagai gelar kekuatan dalam pertahanan nasional. Kalau ini yang terjadi, maka Koter tidak mempunyai kewenangan untuk menjangkau ke wilayah sumber daya nasional yang berstatus sipil di masa damai. Tetapi apabila tugasnya memiliki kewenangan yang sangat luas, melampaui lingkup dan batas fungsi pertahanan seperti pada masa lalu ketika Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di bawah doktrin Dwi fungsi, maka itu tidak betul. Seharusnya komando teritorial saja yang berperan pada bidang pertahanan dan keamanan, selebihnya tidak mempunyai kewenangan untuk menjangkau menangani sumber daya yang berstatus sipil (Agus Widjoyo, *Media Indonesia*, 2004).

Pemahaman tentang pembinaan teritorial harus dilihat secara komprehensif atas pendekatan : pertama, hakikat pembinaan teritorial sebagai pembinaan sumber daya manusia; kedua, kewenangan pada setiap tingkat keadaan bahaya yang akan memberi kewenangan yang berbeda bagi TNI dan pemerintah sipil; ketiga, sesuai kaidah demokrasi seperti diamanatkan oleh konstitusi. Konsistensi antara sistem politik demokrasi se-

bagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap prajurit TNI. Oleh karena itu, tugas apapun yang diberikan oleh bangsa, tidak terjebak dalam wilayah pelanggaran hukum. Jadi pembinaan teritorial tidak hadir sebagai fungsi organik yang melekat pada TNI, tetapi menjadi fungsi organik ketika TNI menjadi penguasa pemerintahan darurat militer atau darurat perang. Dalam keadaan damai, fungsi tersebut tetap merupakan fungsi dari pemerintahan sipil.

Lain lagi pendapat Munir dan Rachland Nursidik, yang meminta untuk segera menarik RUU TNI dan menyerahkan kepada DPR RI yang akan datang. Munir mengatakan bahwa sampai saat ini Indonesia tidak punya satupun Undang-undang yang menyangkut Komando Teritorial (Koter). Mengapa tidak pernah diatur? Karena Komando Teritorial sifatnya operasi militer yang bukan berbentuk struktur organisasi, sehingga bisa diganti berdasarkan peraturan yang berubah atau berdasarkan pada orientasi pertahanan yang baru. Sementara itu menurut RUU TNI, peran tersebut digeser kearah permanen operasi militer untuk perang, dan operasi militer selain perang melalui keputusan Presiden. Sedangkan ope-

rasi teritorial tanpa Kepres, artinya TNI bisa melakukan operasi tanpa Keputusan Presiden apapun. Operasi di daerah bisa mengatas namakan operasi teritorial (Munir, Imparsial, 2004). Kelompok Petisi 50 dan GRM menilai bahwa keberadaan Koter mulai dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil sampai dengan Babinsa merupakan pemborosan. Pasalnya struktur Koter menempatkan pasukan di Kodam jumlahnya hingga puluhan ribu, tetapi penggunaannya sangat situasional. Struktur teritorial ini berpotensi pula untuk mendorong ikut campurnya militer dalam kehidupan politik sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru dahulu (Kelompok Petisi 50, GRM dan HMI, *Kompas*, 24 Agustus 2004).

Kalangan DPR RI, terutama dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dengan lantang menolak fungsi teritorial karena fungsi itu di luar tugas utama TNI dan menganggap adanya Koter sebagai bagian alat politik penguasa. Netercin Do Menino Jesus Osorio Soares (F. PG) juga menolak kata Komando atau Pembinaan teritorial dan diganti dengan fungsi teritorial karena hal itu tetap mempunyai potensi otoriter. Bilamana fungsi teritorial itu tidak dihapuskan, maka FKB akan membuat RUU TNI tandingan yang substansinya antara

lain mengusulkan adanya komando daerah pertahanan sebagai pengganti nama Komando Teritorial yang secara integratif melibatkan seluruh angkatan, menggantikan komando kewilayahan atau Koter yang terkesan hanya mengedepankan TNI - Angkatan Darat (Efendy Choirie, FKB, 2004).

Keadaan Korem 121/ABW di Kalimantan Barat

Propinsi Kalimantan Barat merupakan propinsi terluas keempat di Indonesia, dilewati garis katulistiwa, terletak pada posisi silang berbatasan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I), sehingga sangat memungkinkan untuk dapat menjadi pintu gerbang Indonesia di bagian utara menuju Kawasan Pasifik dan mengakses semua perdagangan nasional dan internasional. Propinsi Kalimantan Barat dijuluki Propinsi "Seribu Sungai" karena memang banyak sungai besar dan sungai kecil, dan berbatasan darat dengan Malaysia Timur.

Penduduk Kalbar berjumlah ± 4,7 juta jiwa (2008) dengan luas wilayah 166, 807 km² dengan panjang perbatasan darat 876 km dari barat ke timur dan terdapat 64 lokasi jalan lintas batas yang masih mengandung banyak kerawanan.

Masyarakat heterogen di Kal-

bar terdiri dari suku dayak (suku darat) \pm 35% dari jumlah penduduk, suku melayu \pm 25% dan selebihnya terdiri dari suku Cina dan suku-suku pendatang seperti suku Jawa, Madura, Bugis, Minang dan lain-lain.

Dalam proses reformasi dan demokratisasi, hampir semua Pilkada, Pemilu dan Pilkadaes telah dapat berjalan lancar, walaupun masih ada friksi-friksi kecil yang masih bisa diredam. Pelaksanaan otonomi daerah belum optimal termasuk daerah kabupaten pemekaran baru, karena sumber-sumber pendapatan asli daerah relatif belum bisa dikembangkan untuk dapat memberi kontribusi kepada pembangunan daerah.

Pengelolaan sumber kekayaan alam (SKA) belum optimal, sementara itu *illegal logging*, *mining* dan penyelundupan perdagangan terus terjadi. Kekuatan pasukan TNI dan Polri yang bertugas di pedalaman dan perbatasan kurang didukung dengan sarana dan prasarana operasi yang memadai, sehingga mobilitas dan efektifitas tugas masih perlu ditingkatkan.

Unsur-unsur aparat birokrasi dan instansi sipil yang bertugas di daerah pedalaman dan perbatasan seperti bea cukai, imigrasi, kehutanan, perkebunan, peternakan dan lain-lain masih dirasakan kurang optimal, teru-

tama dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat. Pemda Kalbar telah membangun satu lembaga *border development center* (BDC) yang bertugas untuk merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan.

Perekonomian Kalbar relatif cepat berkembang, terutama daerah perkotaan, pantai, pesisir utara dan daerah industri kayu, karet, kelapa sawit. Kemajuan daerah kota dan pantai tersebut masih belum bisa diimbangi oleh kemajuan daerah pedalaman yang sumber kekayaan alamnya relatif melimpah.

Budaya masyarakat sangat plural, di samping adat istiadat dari suku-suku yang masih kuat, juga penetrasi adat istiadat suku pendatang cukup berpengaruh. Pluralitas suku dan peradaban tersebut terbukti mampu mendorong dan mengangkat derajat kehidupan baik di daerah pantai maupun pedalaman. Struktur organisasi pemerintahan di Kalbar telah berkembang positif, dari semula hanya 7 kabupaten sekarang menjadi 10 kabupaten. Dahulu hanya ada satu kotamadya, sekarang bertambah satu kota administratif (Kotif) Singkawang. Sepuluh kabupaten tersebut adalah kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Keta-

pang. Sedangkan 2 kota tersebut adalah Kotamadya Pontianak sebagai ibukota propinsi dan kotif Singkawang. Seluruh daerah ini terbagai dalam 147 kecamatan dan 1.448 desa/kelurahan. Secara umum, daratan Kalbar sama dengan 7,6% daratan nasional, sebagai propinsi terluas nomor 4 di Indonesia.

Permasalahan yang menonjol bagi Kalbar yaitu : Pertama, berkaitan dengan batas wilayah RI-Malaysia, Di Kalbar masih terdapat 5 titik lokasi yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah kedua negara. Selain itu, juga masalah patok batas dan penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi.

Kedua, kesenjangan sosial antara masyarakat pedalaman dan perbatasan, terutama dengan masyarakat Serawak. Rakyat Kalbar baru sampai 700 USD *income percapita*, sedang rakyat Serawak sudah 4.000 USD. Tampak jauh sekali perbedaan taraf hidup, ekonomi dan budayanya. Inilah satu hal yang amat memprihatinkan.

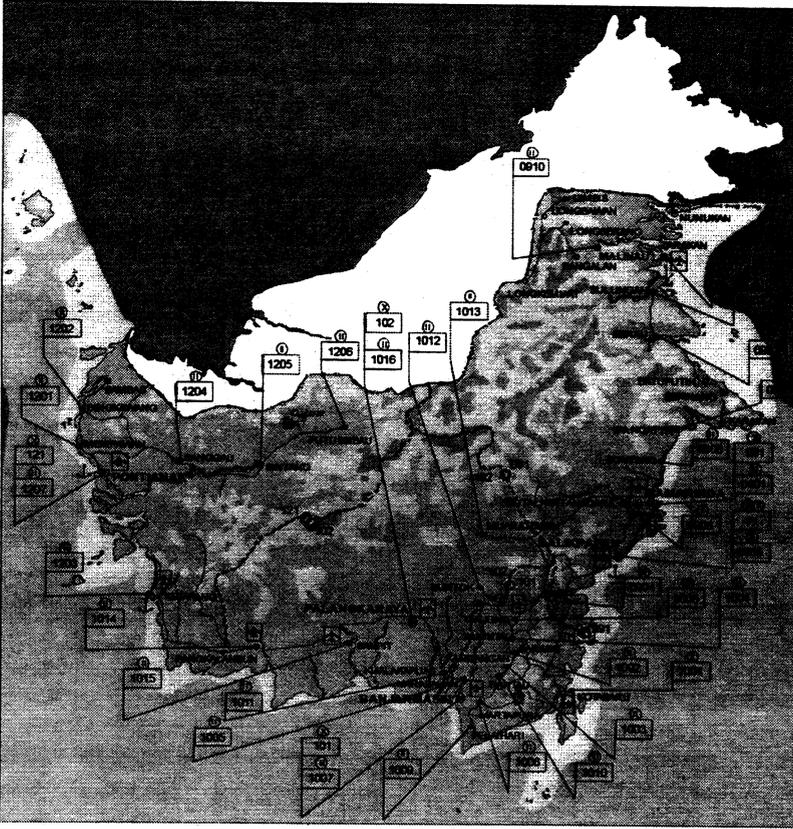
Ketiga, masalah infrastruktur di pedalaman dan perbatasan masih amat terbatas dan belum mampu menjangkau ke daerah-daerah potensial sumber ekonomi karena ketiadaan jalan, jembatan, listrik dan alat komunikasi.

Keempat, eksploitasi sumber alam terutama kayu dan hasil hutan yang belum bisa diaman-

kan dan dikendalikan oleh aparat di daerah.

Ditinjau dari struktur organisasi sebagai salah satu unsur komando teritorial di bawah Kodam VI/Tanjungpura, Korem 121/ABW relatif sudah mapan dan kuat. Korem ini memiliki 7 Kodim yaitu Kodim 1201/Menpawah, Kodim 1202/Sambas, Kodim 1203/Ketapang, Kodim 1204/Sanggau, Kodim 1205/Sintang, Kodim 1206/Putusbau dan Kodim 1207/Kodya Pontianak. Masing-masing Kodim membawahi 15-20 Koramil. Di samping itu, Korem juga mengendalikan satuan tempur berupa Brigif 19, Yonif 641/BH, Yonif 642/K, Yonif 643/WS dan Yonif 644/Kt. Unsur-unsur bantuan tempur seperti Yon Kav, Yon Armed 105 dan Zeni tempur siap digerakkan. Unsur-unsur dukungan operasional seperti zeni konstruksi, perbekalan, angkutan, kesehatan, polisi militer, kehakiman, peralatan dan lain-lain telah tersusun di dalam tata organisasi serta daftar susunan personil dan peralatan yang relatif solid.

Kondisi personil pada umumnya telah terpenuhi 93% dari TOP/DSPP, tetapi dari sudut kualitas dievaluasi hanya mencapai 73%. Kondisi perkantoran, markas, asrama dan perumahan prajurit masih relatif memprihatinkan, terutama perumahan prajurit yang sudah banyak tidak layak huni.



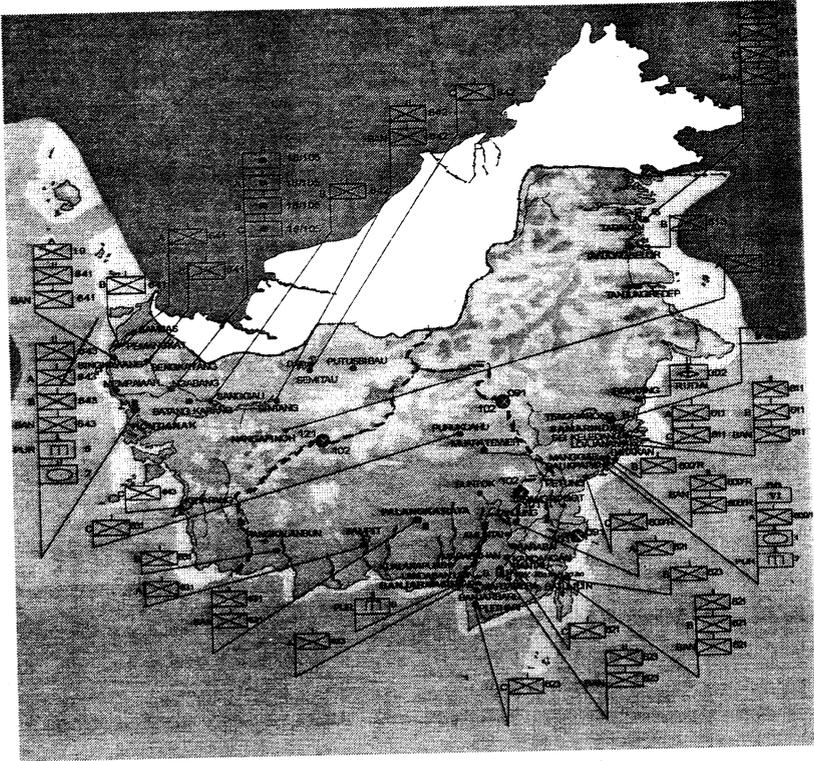
Gambar 2.3

Disposisi dan dislokasi Korem & Kodim se Kodam VI/TPR

Kondisi alat utama sistem senjata (Alutsista) secara kuantitatif terpenuhi 100% terutama senjata perorangan, tetapi kualitasnya hanya tercatat 55% karena banyak senjata yang sudah usia tua.

Dilihat dari sudut kesiapan operasional, Korem 121/ABW melaksanakan 2 (dua) kegiatan pokok, yakni pembinaan teritorial dan operasi pengamanan perbatasan. Kegiatan pembinaan teritorial (Binter) dititik beratkan pada penanaman kesadaran bela

negara bagi seluruh rakyat Kalbar. Kegiatan ini penuh tantangan, terutama pengaruh negara tetangga dan kondisi kemiskinan dan kebodohan di sementara daerah pedalaman. Sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, sikap bela negara dan semangat mempertahankan tanah air menghadapi kendala yang berat. Walaupun kerjasama dengan Pemda cukup baik, tetapi apabila masalah kesejahteraan sosial belum tercukupi, seperti lapangan kerja, pendidikan dan



Sumber : Mabes TNI AD

Gambar 2.4
Dislokasi Satpur & banpur Kodam VI / TPR

kesehatan, niscaya upaya tersebut akan tidak optimal.

Dalam hal pengamanan perbatasan (Pamtas) seperti telah diuraikan di atas bagi TNI/Polri dan instansi terkait lainnya masih menghadapi kendala, terutama anggaran pembangunan bagi sentra-sentra ekonomi belum mampu tumbuh, aksi-aksi penembangan liar dan penyelundupan barang masih terjadi, termasuk penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia ke Serawah dan Kuching.

Berkaitan dengan anggaran pembangunan dari Dephan untuk membangun pos penjagaan perbatasan dan pos lintas batas ternyata belum seluruhnya terdukung, akibatnya bagi prajurit TNI yang patroli dan menjaga pos-pos lintas batas belum dapat terpenuhi sarana penunjang operasinya. Ditinjau dari upaya pembinaan kekuatan, Korem 121/ABW telah memiliki sistem regenerasi yang sistemik dan berkelanjutan, cukup terencana, terarah dan berkesinambungan.

Kekuatan personil, materiil, dan persenjataan terpelihara dengan baik, walaupun dengan kondisi kualitas sarana pendukung yang kurang memadai.

Segi pembinaan kemampuan, terutama kemampuan tempur, intelijen, Binter dan dukungan telah dipelihara dengan baik, melalui pendidikan di daerah atau di pusat serta latihan-latihan yang kontinyu.

Kemampuan intelijen sangat diperlukan untuk tugas-tugas di daerah Kalbar, mengingat ancaman musuh secara terselubung masih cukup membahayakan negara. Infiltrasi dan subversi dari pihak asing masih mungkin dapat masuk ke wilayah Kalbar dengan tujuan untuk mengurangi peran pemerintah dan memperbesar kesempatan bagi pelaku-pelaku kejahatan *illegal logging, mining, fishing* dan lain-lain.

Dalam hal kesiapan operasional, Korem 121/ABW bersama dengan satuan TNI lain dan Polri pada dasarnya telah mampu menangani masalah-masalah prinsip, yaitu menjaga kedaulatan dan pengamanan perbatasan, namun masih perlu dukungan anggaran yang memadai untuk melengkapi peralatan dan sarana-sarana lainnya.

Optimalisasi pemberdayaan wilayah pertahanan

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pemberdayaan wilayah adalah terciptanya ketahanan daerah yang semakin kuat, sehingga dapat mewujudkan daya tangkal (*deterrence function*) daerah terhadap berbagai bentuk ancaman. Untuk dapat mewujudkan ketahanan daerah tersebut paling tidak ada 3 (tiga) aspek penting yang harus ditangani, yakni ketahanan bidang ekonomi, ideologi-politik dan keamanan. Pemerintah daerah wajib memprioritaskan ketiga aspek pembangunan tersebut agar selaras dan seimbang. Pembangunan kesejahteraan harus sejalan dengan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan agar *resultante* keduanya memiliki sinergi timbal balik.

Pembangunan ekonomi rakyat Kalbar harus dapat mengarah kepada swa-sembada pangan, dan bila perlu Kalbar harus mampu mengeksport hasil-hasil pangannya ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri. Daerah ini sangat memungkinkan untuk dikelola, karena potensi sumber kekayaan alamnya cukup besar. Kemantapan ideologi dan nasionalisme Kalbar harus dibina ke arah lebih mencintai negeri sendiri dan tidak berorientasi ke negeri tetangga.

Hal ini penting ditekankan karena pengaruh Malaysia amat kuat dan memiliki akses yang luas dari berbagai sudut yang dapat merusak jati diri dan nasionalisme Indonesia.

Demikian pula pembangunan aspek pertahanan dan keamanan untuk mendukung pembangunan daerah harus dapat dipelihara dan dikendalikan secara efektif dan berlanjut, dan tidak memberi peluang kepada niat-niat lawan untuk mengancam di perbatasan atau mempengaruhi rakyat untuk membangkitkan ide separatisme.

Daya tangkal daerah akan muncul dengan sendirinya manakala kondisi kesejahteraan rakyatnya terjamin, "rakyat sejahtera, negara kuat" (Sayidiman S, 2007). Pemerintah daerah bersama unsur-unsur TNI/Polri dan aparat pemerintah lainnya akan semakin dapat memantapkan diri, untuk bersama-sama melawan segala bentuk gangguan dan ancaman yang akan dapat menghancurkan daerahnya. Konsep strategis ini akan bisa terwujud apabila pemerintah daerah, unsur-unsur birokrasi dan aparat keamanan di daerah mampu menjabarkannya dalam langkah-langkah nyata dan tertuang di dalam bentuk program pembangunan jangka pendek, sedang dan jangka panjang.

Dalam rangka implementasi konsepsi strategis di atas, maka langkah-langkah nyata pemerintah daerah bersama-sama TNI/Polri yang perlu ditempuh adalah pertama, membangun dan mengembangkan daya tangkal daerah dengan titik berat pada pembangunan bidang ekonomi. Kedua, upaya mengembalikan soliditas penduduk dengan memperkecil atau meniadakan konflik horizontal antara suku dan kelompok. Ketiga, penjagaan dan pengamanan perbatasan harus semakin kuat. Secara lebih implementatif dan optimis dirinci sebagai berikut: pertama, menciptakan daya tangkal daerah. Kondisi geografis, demografis dan psikologis masyarakat Kalbar masih menghadapi infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi ini akan berakibat pada melemahnya ketahanan daerah karena kesenjangan sosial dan perbedaan taraf hidup yang mencolok. Kesadaran bela negara dan pemahaman tentang falsafah hidup Pancasila menjadi cenderung kurang diminati dan dipandang tidak perlu lagi.

Bagi masyarakat pedalaman yang hunian antar kampungnya terpisah oleh gunung, sungai, rawa dan lembah merasa yang terpenting bagi mereka adalah bisa makan dan mencari lapangan kerja untuk hidup. Masyarakat mempertahankan hidup dari

sumber-sumber alam dan bekerja di perkebunan atau peternakan yang ada disekitar tempat tinggalnya.

Daya tangkal wilayah bisa terwujud apabila ekonomi, kesejahteraan, lapangan kerja dan semua kebutuhan hidup tercukupi. Rakyat akan rela berkorban demi mempertahankan daerah dan kampung halamannya apabila daerah itu memang dapat memberikan kehidupan yang memadai. Mereka akan sanggup menghadapi gangguan dari pihak-pihak mana pun. Rakyat juga akan bersedia membangun infrastruktur dan mengembangkan pusat-pusat kemajuan bagi daerahnya asalkan pemerintah mendukung dan mampu membiayai kebutuhan minimal di setiap desa-desa atau kota-kota kecil di pedalaman. Di sini peranan APBD sangat diperlukan, terutama distribusi dan penyebaran pembangunannya. Daya tangkal wilayah pada hakikatnya mencakup dua aspek, yakni aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik sudah barang tentu terkait dengan pembangunan kekuatan fisik, baik manusianya, sumber penghidupan, maupun pranata sosial lainnya.

Untuk mewujudkan daya tangkal daerah, maka harus dimulai dari upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Tanpa kehidupan yang layak dan penuh

kesejahteraan, mustahil rakyat bersedia mempertahankan daerahnya. Pembangunan ekonomi rakyat memang telah dirintis dan dikembangkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, tetapi sebagaimana kenyataan yang dapat diamati dan diteliti bahwa hampir 60% rakyat pedesaan dan pedalaman masih banyak yang hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan. Kemajuan pesat terlihat hanya di daerah-daerah perkotaan dan daerah pantai Kalbar. Pembangunan infrastruktur daerah sebagai wahana dan pendorong kemajuan pembangunan ekonomi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ada 3 hal penting dalam upaya mengembangkan simpul-simpul wilayah pembangunan untuk menunjang bangkitnya loyalitas dan perekonomian rakyat, yakni pertama: pembangunan pasar; kedua, memperbanyak sekolah (SD, SMP, SMA dan lain-lain); ketiga, aktualisasi pusat-pusat pengobatan masyarakat atau Puskesmas. Trilogi pembangunan daerah Kalbar ini memiliki manfaat besar dan sangat relevan dengan kondisi daerah, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

Kesulitan rakyat selama ini berkaitan dengan keinginan menjual hasil produksi pertanian dan perkebunan ke pasar-pasar terdekat yang belum terpenuhi.

Hasil pertanian, perikanan, perkebunan di daerah hulu harus dipasarkan ke Pontianak atau Singkawang sebagai pasar yang besar, tetapi untuk mengangkut dan membawa barang dagangan tersebut memerlukan waktu sehari-hari apabila melewati sungai dengan perahu motor yang disebut *bandung-bandung*. Bila melalui jalan darat, di samping ongkos yang mahal, juga masih langka kendaraan darat yang mampu masuk ke kampung-kampung. Walaupun kini sudah ada beberapa jalan masuk yang dibuat oleh pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten, tetapi tetap belum memadai. Jadi, bila penyebaran pembangunan infra struktur itu semakin banyak dan mendekati komunitas produksi di daerah, maka rakyat akan semakin bersemangat untuk bertani, berladang, mengembangkan hasil hutan serta lebih mencintai kampung halamannya.

Sekolah dan Puskesmas adalah dua elemen penting bagi peningkatan kualitas hidup rakyat di Kalbar. Sekarang ini masih banyak sekolah yang tidak terurus dengan baik; ada murid tapi tak ada guru. Bangunan sekolah dan ruang-ruang kelasnya relatif tua dan harus diperbaiki, tetapi tidak ada dana. Disiplin guru banyak yang merosot

karena kesejahteraannya kurang diperhatikan. Kondisi semacam ini harus bisa dirombak dan dibangkitkan kembali, terutama pembangunan dan penyebaran sekolah dasar dan lanjutan. Guru-guru bantu atau sukarelawan guru dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat segera harus diangkat menjadi guru tetap agar proses belajar mengajar tersebut berjalan baik.

Puskesmas, poliklinik dan kelompok PKK ibu-ibu di tiap-tiap desa dan kampung harus diarahkan, didukung dan dibiayai oleh pemerintah untuk mendidik penduduk desa-desa dan perkotaan ke arah hidup sehat. Pengobatan gratis harus direalisasikan dan didanai oleh APBD. Masyarakat pedalaman yang terisolir oleh keadaan alam dan relatif banyak yang miskin tidak mungkin berharap bisa memperoleh pengobatan karena ketidakmampuannya. Oleh karena itu Puskesmas tidak boleh pasif dan menunggu mereka berobat, tetapi sebaliknya Puskesmas dan petugas kesehatan lapangan harus secara periodik turun ke bawah dan masuk ke daerah-daerah terisolir. Mungkin sekarang sudah dilakukan tetapi hasilnya belum nyata karena sebagian masyarakat miskin belum banyak menikmati pengobatan gratis. Mantri-mantri kesehatan harus ada yang bekerja di luar

jamnya untuk pergi ke tempat tinggal penduduk guna memberikan pengobatan. Kegiatan ini cukup positif dan wajib didukung. Pada bagian lain yang dipandang amat penting adalah pengembangan daya tangkal non fisik. Arah upaya ini adalah untuk membangkitkan kesadaran bela negara, cinta merah putih dan cinta tanah air. Saat ini banyak masyarakat Kalbar yang berorientasi ke Serawak atau Kuching (Malaysia) bukan karena motif politik tertentu tetapi lebih karena alasan ekonomi dan kemudahan komunikasi. Oleh sebab itu, untuk menciptakan daya tangkal psikologis maka harus dimulai dan digalakkan sosialisasi berbagai perundang-undangan yang banyak mendukung kepentingan rakyat, termasuk pula yang bersifat filosofis maupun ketatanegaraan secara implementatif.

Bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan, perlu dilaksanakan proses internalisasi dan revitalisasi melalui pengenalan simbol dan nilai-nilai kebangsaan yang objektif dan subjektif. Secara umum pemerintah daerah bersama jajaran TNI dan Polri dapat senantiasa menegaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang format negara demokrasi yang sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia dan rakyat

Kalbar. Hal ini dilakukan untuk menanamkan keyakinan bahwa hak hidup, hak azasi, hak melindungi serta dilindungi dan seterusnya menjadi hak azasi masyarakat dalam negara demokrasi.

Bila rakyat menyadari akan hak dan kewajibannya untuk ikut serta membela kampung halaman, dalam hal ini daerah Kalbar pada umumnya, maka daya tangkal rakyat dan wilayah ini akan dapat semakin terwujud. Sebaliknya, bila masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan daerahnya dan tidak merasa perlu mempertahankan maka tingkat kesadaran dan daya tangkal wilayah akan masuk dalam kategori membahayakan atau rapuh.

Kedua, upaya mengatasi terjadinya konflik horizontal. Kalbar merupakan salah satu daerah propinsi di Indonesia yang relatif rentan terhadap masalah konflik kesukuan, konflik keagamaan dan konflik karena kesenjangan sosial ekonomi. Beberapa kasus konflik horizontal yang perlu diungkapkan dan terjadi pada masyarakat Kalbar adalah sebagai berikut ini. Pada tahun 1967 terjadi peristiwa "mangkok merah", yaitu suatu kasus pengusiran suku Cina dari pedalaman Kalbar oleh suku dayak yang dipicu karena terbunuhnya warga dayak oleh etnis Cina di daerah Montrado,

Bengkayang. Kasus ini merambat dengan cepat sekali dari kampung ke kampung lain dan dari suku dayak yang satu ke yang lain. Kecepatan berita dibunuhnya suku dayak tersebut adalah akibat solidaritas yang sempit tanpa meneliti kabar sebenarnya. Tanda dan simbol solidaritas yang lazim untuk kecepatan beredarnya mangkok merah itu diwujudkan dalam 4 elemen ritual, yakni darah ayam sebagai simbol perang, bulu burung sebagai simbol harus cepat (seperti terbang), batang korek api (berarti tanda biar malam harus terus dijalankan tak boleh berhenti) dan selempar kayu sirap yang berarti biar hujan tetap harus jalan terus sampai semua suku Dayak tahu dan ikut berperang.

Dari sistem komunikasi dan simbol itulah kemudian beredar dari kampung ke kampung, dari sektor barat hingga ke sektor timur, yang diikuti dengan gerakan perang mandau, panah dan tombak, memburu orang-orang Cina di pedalaman Kalbar. Ratusan penduduk Cina mati, terkapar di jalan-jalan, terbakar di toko-tokonya atau diburu ditengah hutan sehingga bangkai suku Cina itu terserak di berbagai tempat. Keadaan yang paling parah dan banyak terjadi pembunuhan adalah di sekitar daerah Anjungan dan Kec. Mandor (\pm 60 km dari kota Pontianak

ke utara).

Setelah itu suku Dayak menguasai sawah-sawah Cina yang sudah akan panen. Mereka (suku Cina) terusir dari daerah ini. Cina yang selamat (wanita dan anak-anak) lari ke daerah pantai dan minta perlindungan kepada aparat keamanan di daerah, serta berlindung di rumah keluarga-keluarga non suku dayak.

Peristiwa ini begitu mengharukan, dan terlihat masyarakat pedalaman semakin buas memburu warga Cina sampai ke daerah pantai di pinggiran kota. Kasus ini memang bertepatan dengan dimulainya operasi TNI untuk menumpas anggota PGRS/Paraku di Kalbar yang hampir mayoritas anggotanya adalah dari suku Cina. Semula mereka adalah sukarelawan RI untuk ganyang Malaysia tetapi setelah G 30S/PKI ditumpas TNI ternyata mereka adalah sukarelawan dari kader-kader PKI.

Berikutnya adalah konflik suku Dayak dengan suku Madura. Suku Madura datang pertama kali ke pulau Kalimantan antara tahun 1930 dan 1940, dan menjadi buruh di perkebunan dan pertanian. Kemudian secara besar-besaran datang kelompok suku Madura pada 1970an. Mereka mulai menguasai lapangan kerja kasar, seperti tukang becak, tukang perahu,

pemecah batu, kuli, sopir dan pedagang keliling di kampung-kampung, termasuk pedagang kaki lima di pasar-pasar.

Suku Madura yang masuk ke pedalaman Kalbar umumnya bertani, ikut bekerja di perkebunan dan berdagang dengan suku-suku lain seperti Dayak, Melayu dan Cina. Ada satu budaya Madura yang membuat suku lain di Kalbar merasa tidak nyaman, yaitu kebiasaan membawa senjata tajam, suka membunuh, mencuri, merampok dan mengeroyok. Suku Dayak yang bertani sering tidak bisa tenang bila mana sawah mereka menjelang masa panen, karena jika sempat lengah memanen maka akan dicuri oleh suku Madura. Perasaan benci dan tidak aman bermukim berdekatan dengan suku Madura dirasakan hampir di semua daerah yang dihuni oleh suku Dayak dan Melayu.

Perkampungan suku Madura hampir tidak pernah menyatu dengan kampung-kampung suku lain. Mereka cenderung memisahkan diri, mengelompok sesama orang Madura dan cenderung ada yang kurang akur dengan penduduk setempat. Beberapa catatan benih-benih kebencian suku Dayak terhadap suku Madura yang terjadi pada tahun 1968 sampai dengan 1993 bermula dari soal-soal sepele seperti cemburu, soal utang-pi-

utang, soal tanah dan kriminalitas lainnya yang memicu suku lain (Dayak, Melayu, Bugis) beraksi membalas lebih kejam, sehingga terjadi saling membunuh dan saling mengusir dari pemukimannya (<http://www.hrw/Reports/1997/wkali/Borneo-97d-02htm>).

Bagi suku Dayak, kedatangan suku Madura membuat mereka tidak nyaman, selalu terganggu dan selalu timbul kecurigaan dan saling mengancam. Berkali-kali pemimpin suku Dayak (Panglima Suku) melontarkan tantangan "bila satu orang Dayak mati terbunuh oleh orang Madura, maka kami siap menyerang suku Madura". Ancaman dan ultimatum seperti itu masih sering terjadi hingga saat ini.

Pada tahun 1996 terjadi lagi peristiwa tragis suku Dayak menyerang dan memburu suku Madura dari pedalaman Kalbar. Hampir semua suku Dayak bersatu mengusir suku Madura dari kampung-kampung di pedalaman agar keluar dari Kalbar. Kasus ini muncul karena ketidakpuasan suku Dayak terhadap sepak terjang dan perilaku suku Madura yang seringkali menimbulkan perdebatan, perselisihan dan pertengkaran.

Penyebab klasik yang seringkali muncul adalah soal hak atas tanah, perebutan ladang, hutang piutang dan persoalan kecil lain-

nya. Korban pengungsi suku Madura ditampung di asrama tentara, masjid-masjid dan kompleks perumahan yang aman di kota Singkawang, Mempawah, Anjungan dan Pontianak. Usaha tersebut sebenarnya hanya untuk menghindari pertumpahan darah yang tak terkendali.

Suku Madura yang menjadi korban lebih kurang 300 orang yang dibantai di berbagai tempat dan bau bangkai tercium di mana-mana. Beberapa contoh kasus di atas menunjukkan bahwa perselisihan antar suku (etnis) lebih rentan dan mudah dipicu yang kemudian menjadi konflik horizontal yang meluas dan berakibat fatal. Seperti juga yang diingatkan oleh Robert Lowry (1996) bahwa penduduk Indonesia yang lebih dari 230 juta jiwa dengan kekuatan TNI hanya sekitar 0,25% dari total penduduk itu akan sulit untuk dapat di kembalikan.

Oleh sebab itu, dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan dan menciptakan kesejahteraan maka Pemda Kalbar telah mengambil kebijakan strategis dengan motto "harmonis dalam etnis". Dalam upaya pemberdayaan wilayah ini, agenda yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah adalah peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi hubungan antar etnis melalui berbagai jalur interaksi,

baik yang berkaitan dengan aspek ibadah keagamaan, hubungan usaha dan ekonomi serta budaya dan olah raga. Pengembangan kebudayaan bertumpu pada pemeliharaan atau pelestarian seni dan budaya daerah. Program ini diharapkan dapat memupuk keakraban internal suku-suku yang ada, dan sebagai pengembangannya diperkenalkan berbagai kesenian dan kebudayaan daerah lain yang dibawa oleh suku-suku pendatang dan bisa dinikmati oleh semua penduduk.

Usaha integrasi dan harmonisasi ini harus mendapat dukungan dan fasilitas dari Pemda dan seluruh perangkat sosial yang ada di daerah-daerah. Satu hal yang tidak boleh lengah dan harus tetap dijaga kelestariannya adalah peningkatan upaya keamanan, ketertiban dan penanggulangan berbagai tindak kriminalitas. Terciptanya rasa aman, terlindungi dan terayomi sangat didambakan oleh masyarakat. Langkah ini menjadi prioritas dan sudah dimulai oleh Pemda, yaitu peningkatan kemampuan pertahanan negara, peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penghapusan berbagai bentuk diskriminasi. Pemerintah daerah juga mulai memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan, administrasi usaha serta penegakan dan penghormat-

an terhadap hak asasi, hak hukum dan hak hidup semua suku bangsa, ras dan golongan. Kebijakan tersebut sudah diterapkan dan berkembang cukup baik terutama pada dekade terakhir. Beberapa indikator kemajuan yang telah dapat dicapai dievaluasi terus menerus. Masalah penjagaan ketertiban dan pemberantasan kriminalitas masih belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan, karena akhir-akhir ini justru para pejabat dan penegak hukum sendiri ada yang terlibat dalam *illegal logging* dan perbuatan tercela lainnya.

Ketiga, adalah upaya Pengamanan Perbatasan (Pamtas). Lemahnya penjagaan perbatasan kini amat dirasakan bukan saja oleh para prajurit TNI yang bertugas di sana tetapi juga oleh semua instansi terkait yang harus melaksanakan penertiban dan pemeriksaan pada pos-pos lintas batas. Pada bab terdahulu telah diuraikan tentang kondisi perbatasan terutama pos lintas batas (PLB) dan patok-patok batas yang sudah rusak atau bergeser tempatnya. Dalam konteks upaya pemberdayaan wilayah pertahanan ini ada beberapa kebijakan yang telah dan sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun Pemda Kalbar, antara lain dengan pertama, melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan melalui

pengembangan pembangunan *Border Development Center* (BDC) di daerah Entikong, Kab. Sanggau dan di Nanga Badau serta Kab. Kapuas hulu. Di samping itu pusat penanganan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di Serawak, Kucing dan lain-lain perlu dilakukan dengan baik. Pusat pelayanan TKI di Entikong ini semakin padat kegiatannya.

Bersamaan dengan upaya tersebut, dilaksanakan pula kebijakan integrasi regional wilayah Kalimantan, yaitu terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kalimantan berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Konsepsi penjagaan dan pembangunan wilayah perbatasan secara makro konsepsi dilakukan merintis 6 Simpul Wilayah Pembangunan (SWP) yakni di Tema-ujuk - Kab. Sambas, di Aruk - Kab. Sambas, di Jagoi Babang - Kab. Bengkayang, di Entikong - Kab. Sanggau, di Kec. Jasa - Kab. Sintang dan Kec. Nanga Badau - Kab. Kapuas hulu. Secara rinci dapat diperiksa pada gambar berikut.



Sumber : Bappeda Prop. Kalbar.

Gambar 5.1 : Spesialisasi kegiatan pada BDC Kalbar

Pembangunan SWP mulai dari Temajuk dan seterusnya sampai dengan Nanga Badau tidak lain adalah bertujuan untuk menstimulasi tumbuhnya simpul-simpul ekonomi rakyat. Sesuai potensi daerah yang bersangkutan diteliti, dieksplorasi dan ditumbuh kembangkan oleh pemerintah bersama TNI / Polri guna memajukan daerah perbatasan. BDC Kalbar akan bekerja terus dan memantau perkembangannya. Selama ini, infrastruktur dan kemauan kerja keras penduduk masih menjadi kendala; stimulasi pemerintah seringkali berhenti sendiri dan tidak menuai kemajuan.

Upaya pemberdayaan wilayah bukan saja membangun daerah pantai dan perkotaan, tetapi juga daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur, jalan-jalan kelas 3 antar kecamatan dan kampung serta energi listrik dan sarana komunikasi harus menjadi prioritas utama. Bila keadaan tersebut dapat dibangun oleh pemerintah setahap demi setahap dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka rakyat akan berpartisipasi dan memperkuat dukungannya kepada pemerintah.

Korem 121/ABW dalam hal ini selaku penanggung jawab penjagaan dan pengamanan

daerah perbatasan, akan terus meningkatkan kemampuannya. Keberhasilan tugas Pamtas ini juga tidak mungkin hanya dilakukan oleh TNI/Polri dan aparat birokrasi lain, tetapi peranan panglima suku, tokoh adat dan pemuka agama di daerah perbatasan dan pedalaman sangat penting dan berpengaruh kuat; karena itu pula, pembinaan potensi sumber daya manusia ini sangat diperhatikan oleh Korem.

Optimalisasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan adalah tersedianya kekuatan TNI/Polri di daerah yang cukup seta dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang siap, untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman di masa mendatang. Pembangunan kekuatan TNI dan Polri sudah terencana, terorganisasi dan terlaksana dengan baik, walaupun mungkin masih perlu penyempurnaan dan peningkatan kinerjanya. Kekuatan cadangan yang terdiri dari rakyat terlatih dan sumber daya pendukung lainnya diarahkan serta dikelola dan dikembangkan untuk dapat dijadikan kekuatan siap. Walaupun pada masa damai, tenaga yang termasuk pada komponen cadangan tersebut berada pada bidang tugas dan profesi masing-masing,

tetapi harus tetap berdisiplin dan siap dipanggil setiap saat berdasarkan undang-undang.

Sambil menunggu lahirnya undang-undang tentang komponen cadangan dan komponen pendukung, undang-undang mobilisasi dan demobilisasi serta undang-undang wajib militer, maka selayaknya tiap-tiap daerah sudah merintis dan menyiapkan sistem maupun kerangka mekanisme dalam rangka membina masyarakat untuk siap melakukan upaya-upaya bela negara dalam berbagai bentuk dan kegiatan. Pendidikan kesadaran bela negara dan implementasinya pada masa damai dalam fungsi dan tugas sehari-hari perlu mendapat arahan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya. Lembaga swadaya masyarakat, para relawan dan organisasi-organisasi non pemerintah lain hendaknya dapat dilibatkan dalam membentuk sikap dan perilaku yang bermuara pada kecintaan terhadap tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, maka pembangunan kekuatan TNI diarahkan untuk mencapai sasaran dan menghasilkan prajurit serta institusi TNI di daerah yang dapat melaksanakan tugas menegakkan kedaulatan negara, mem-

pertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa. Demi keberhasilan tugas tersebut, maka TNI diberi kewenangan untuk menjalankan operasi militer untuk perang (OMP) menghadapi musuh nyata tentara asing dan juga diberi tanggung jawab untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Di masa damai, OMSP sangat luas cakupannya, meliputi operasi menumpas separatisme dan pemberontak, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan dan objek-objek vital nasional, membantu tugas-tugas pemerintah daerah, membantu menanggulangi bencana alam dan lain-lain.

Dalam proses pembangunan kekuatan TNI berdasarkan undang-undang No. 34 tahun 2004 tersebut, secara umum penerimaan, pendidikan, pengorganisasian dan penugasan sampai dengan pemberhentian sudah cukup jelas diatur sistem maupun mekanismenya. Oleh sebab itu pembangunan kekuatan Korem yang ditekankan adalah memelihara TOP/DSPP yang ada dan selalu melakukan evaluasi, baik kekuatan, kemampuan maupun disposisi gelarnya.

Polri dibangun dan dikembangkan pada tugasnya berdasarkan amanat undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kekuatan Polda Kali-

mantan Barat telah digelar sesuai dengan struktur pemerintahan daerah, mulai dari tingkat Polda, Polwil, Polres, Polsek sampai dengan Babinmas di desa-desa. Rekrutmen Polri untuk pangkat tamtama dan bintara bisa dilakukan di daerah masing-masing, termasuk Kalbar; sedangkan untuk pangkat perwira harus dididik secara terpusat, baik melalui Akademi Kepolisian maupun Sekolah Calon Perwira dan Sekolah Perwira Prajurit Karier (Sepapeka) Polri.

Tugas kepolisian yang utama ada 3 hal, yakni pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Dalam hal ini, tampak Polisi tidak memiliki tugas-tugas seperti TNI (mempertahankan kedaulatan dan lain-lain), tetapi sesuai amanat UUD RI 1945 nantinya pada saat negara dalam keadaan darurat atau perang maka Polri dimobilisasi ke dalam komponen utama pertahanan negara.

Kinerja Polda Kalbar secara umum sudah mampu memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tetapi upaya penegakan hukum dalam memberantas kejahatan dan kriminalitas masih terlihat kurang optimal. Oleh sebab itu, pengawasan dan kritik masyarakat sangat diperlukan guna meningkatkan kinerja dan pengabdianya bagi kepentingan masyarakat Kalbar.

Sebagai kekuatan non militer

pendekatan dasar hukum sistem dan metoda yang dipakai untuk membangun kekuatan sipil tentu berbeda dengan metoda di militer. Rakyat Kalbar harus dipilih dan dipilah-pilah menurut komunitas, profesi, lingkungan dan adat. Oleh sebab itu, dalam rangka pemberdayaan wilayah maupun dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan negara maka jangan sampai rakyat menjadi bingung dan sulit untuk berpartisipasi.

Pada masa damai, kehidupan rakyat tidak boleh terganggu, karena menyangkut hak hidup dan hak mencari penghidupan. Tetapi, sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara, maka arahan, ajakan dan aturan pemerintah harus jelas.

Pendekatan yang dipakai di Kalbar dalam rangka membina dan mengarahkan masyarakat harus memiliki keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pembelaan negara. Secara alamiah berdasarkan geografis dan demografis, maka pembangunan kekuatan sipil dapat ditempuh melalui pendekatan lapangan kerja atau profesi. Langkah pertama, di daerah sungai dikembangkan komponen kekuatan sungai yang terdiri dari para pengemudi kapal motor air, bandung-bandung, tukang sampan, pedagang tera-

pung dan lain-lain yang semuanya bisa diberikan hal-hal. Komponen kekuatan sungai ini umumnya dari suku Melayu, Jawa, Madura dan pendatang lainnya yang biasa hidup dan mencari nafkah dari keahliannya di air.

Langkah kedua, di daerah pantai dikembangkan komunitas komponen kekuatan pantai yang terdiri dari nelayan, pedagang dan masyarakat pantai yang populasinya cukup besar. Komunitas ini berpotensi sebagai ahli di bidang laut dan pantai, dan secara teknis akan dibina oleh TNI AL untuk menjadi komponen cadangan kekuatan TNI AL. Nelayan perlu diberi kemudahan tentang perizinan usaha perikanan, pembuatan perahu dan lain-lain, serta diberikan bantuan dana untuk modal menangkap ikan, sehingga merasa menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat.

Langkah ketiga, di daerah daratan dan pedalaman perlu dikembangkan komponen kekuatan darat dengan sumber potensi dari penduduk suku Dayak yang bermukim di pedalaman dan daerah perbatasan. Sampai dengan tahun 2007 penduduk asal suku Dayak berjumlah $\pm 35\%$ dari total seluruh penduduk Kalbar. Hal ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi komponen kekuatan darat.

Pembangunan komponen kekuatan darat ini menggunakan metoda pendekatan adat istiadat, terutama soal kewenangan panglima suku, peralatan perang yang bisa diizinkan dan kesejahteraannya. Suku Dayak menguasai daerah dan memiliki mobilitas tinggi di tengah hutan belantara, serta ketahanan fisik yang lebih kuat bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, karena terlatih di daerah-daerah yang keras tantangan alamnya. Bila kekuatan daratan ini bisa dibina, dipelihara kesejahteraan dan lapangan kerja pertaniannya serta diperhatikan bantuan-bantuannya, maka di atas pundak suku-suku inilah daratan Kalbar akan dipertahankan dari ancaman lawan.

Langkah keempat, komunitas profesi di daerah pantai dan perkotaan, yang terdiri dari para pegawai birokrasi, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, dan karyawan-karyawan swasta lainnya: perlu di kembangkan. Komunitas ini pada umumnya adalah tenaga terdidik, terlatih, memiliki keahlian, ketrampilan dan pada level tertentu juga memiliki wawasan yang cukup. Oleh karena itu metoda pendekatan yang digunakan sebaiknya adalah pemilahan kelompok-kelompok keahlian dan ketrampilan secara spesifik, tidak merendahkan martabat, dan justru mengangkat keahlian dalam

bidangnya untuk memberikan sumbangsih demi kepentingan pertahanan dan keamanan daerah. Pembinaan komunitas tersebut cenderung lebih mudah karena memiliki pimpinan, disiplin dan kerjasama diantara institusi.

Langkah kelima, pembinaan pada area dan komunitas pemukiman. Daerah Kalbar amat luas, banyak pemukiman penduduk yang tersebar di seluruh pelosok, baik penduduk asli maupun pendatang, misalnya komplek transmigran dari luar pulau Kalimantan.

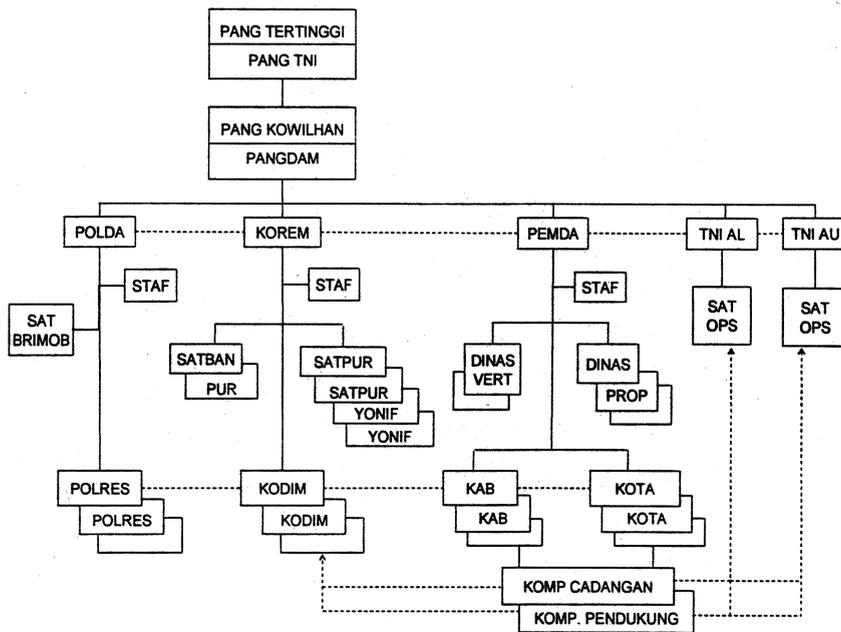
Pembangunan komponen pada komunitas pemukiman harus dimulai dari pendekatan kesejahteraan keluarga, baik secara ekonomis maupun sosial. Interaksi antar penghuni sudah cukup baik, tetapi pemahaman tentang kewajiban ikut serta bela negara tentu kurang dipahami, sehingga pemerintah bersama TNI harus kerja keras untuk sosialisasi dan internalisasi.

Langkah keenam, Pembinaan sumberdaya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), sarana dan prasarana (Sarpras). Pembangunan komponen SDA, SDB dan Sarpras pada dasarnya mengikuti kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Eksplorasi dan eksploitasi SDA harus bisa diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, membuka lapangan kerja, mem-

beri nilai lebih bagi daerah-daerah pemilik kekayaan alam tersebut serta dapat memberi kontribusi bagi kepentingan pertahanan. Pembangunan sarana dan prasarana daerah untuk kepentingan kesejahteraan harus dapat memberi efek psikologis kepada masyarakat, antara lain kebanggaan dan kesediaan mempertahankan bila ada pihak-pihak yang akan mengganggu atau merusaknya. Kebanggaan itu pula yang bisa berkembang menjadi daya tangkal rakyat, dan hal ini harus terus diakselerasi.

Langkah ketujuh, pengorganisasian komponen kekuatan yang terintegrasi. Semua kom-

ponen kekuatan di daerah tidak akan berarti manakala tidak ada organisasi yang menjadi wadah dan tempat pengabdianya. Organisasi yang solid yang dapat memadukan semua komunitas sipil dengan berbagai ragam kepentingan adalah persyaratan yang harus dicari solusinya. Organisasi militer dan kepolisian sudah tertata rapi, begitu pula pemerintah daerah dengan seluruh jajarannya sudah terorganisir dengan baik dan berjenjang. Berikut sebuah gambar visualisasi organisasi yang bisa disiapkan.



Keterangan : — : garis komandom, --- : garis koordinasi,
 --▶ : pengganda kekuatan

Gambar 5.2
 Sistem Pertahanan Semesta dengan struktur terintegratif di daerah.

Sebagai penjelasan singkat dari gambar tersebut, diasumsikan bahwa dalam upaya menangkal lawan atau agresi musuh (asing) yang sempat mendarat dan menduduki wilayah daratan di suatu daerah, maka panglima komando wilayah pertahanan atau sekurangnya panglima daerah akan mengkoordinir seluruh kekuatan TNI, Polri dan unsur-unsur pemerintahan sipil (Pemda) untuk menyatukan kekuatan untuk melawan dan mengusir penjajah (agresor).

Untuk wilayah Kalbar, pimpinan Korem 121/ABW/Polda Kalbar dan Pemprov Kalbar harus dapat mensinergikan seluruh kekuatan eselon di bawah komando masing-masing. Dalam keadaan darurat/perang maka komandan Korem akan diberi kewenangan mengambil alih seluruh komando unsur-unsur yang terlibat untuk dapat mengkoordinir dan menyatukan kekuatan pertahanan di daerah Kalbar.

Optimalisasi model struktur komando tersebut harus ditata, dilatih dan diuji untuk mendapatkan daya gempur dan daya tangkal yang lebih handal. Saat ini memang masih belum tampak jalinan kerjasama antara unsur-unsur pertahanan, baik TNI/Polri maupun Pemda, karena undang-undang tentang hubungan

tugas dan model pengerahan komponen cadangan dan pendukung masih dalam proses pembahasan.

Optimalisasi kesiapan operasional Korem 121/ABW

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi kesiapan operasional Korem 121/ABW adalah terciptanya kesiapan siagaan pusat pengendalian operasi (Puskodalops) di tingkat Makorem yang dapat *on line* dengan Puskodalops Kodam, dengan ditunjang oleh kesiapan operasional satuan-satuan organik Korem dan satuan-satuan lain yang diperbantukan kepada Korem 121/ABW. Walaupun Puskodalops bekerja baik dan selalu siap mengendalikan satuan operasional, tetapi bila satuan-satuan lapangannya tidak siap dan kurang disiplin maka dapat dikategorikan bahwa Korem tersebut tidak siap operasi. Begitu pula sebaliknya, manakala satuan-satuan lapangan telah tergelar dengan dislokasi yang baik dan berdisiplin tinggi, sedangkan Puskodalopsnya tidak diawaki oleh personil yang cakap dan trampil, maka pasukan di daerah operasi akan menghadapi kendala dan dapat menyebabkan kehancuran pada pasukan sendiri.

Satuan-satuan organik Korem 121/ABW sebagai penjaga dan

pengawal tetap daerah Kalbar, termasuk daerah pembatasan, akan dituntut kesiapannya setiap saat. Pasukan pendatang boleh berganti-ganti, tetapi pasukan Korem 121/ABW tidak akan meninggalkan tempat, kecuali ada perintah atau permintaan mutasi dari pimpinan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penataan organisasi, pemenuhan personil, peningkatan frekuensi latihan dan juga kesejahteraan prajurit harus mendapat perhatian khusus dan mendapat prioritas pembangunan.

Langkah pertama, perlu dilakukan validasi satuan-satuan organik. Hal tersebut sangat mendasar dan diperlukan untuk pembinaan satuan ke depan. Setelah upaya evaluasi terus-menerus pada kuantitas dan kualitas kesiapan satuan, maka harus dapat ditentukan tindakan-tindakan nyata berupa validasi organisasi, rasionalisasi personil dan verifikasi peralatan serta Alutsista. Tiga hal ini sangat penting untuk dapat memutuskan mana organisasi yang perlu dirampingkan dan diefektifkan serta dimantapkan. Rasionalisasi pada hakikatnya ingin menempatkan personil pada jabatan yang tepat. Rasionalisasi juga memberlakukan sistem meritokrasi dalam kaitannya dengan pembinaan karier bagi semua personil perwira, bintanga dan

tamtama.

Alutsista yang sudah tidak layak pakai dan nilai akurasinya diragukan, harus ditarik dan dikembalikan ke satuan atas; tidak layak mempersenjatai prajurit dengan senjata-senjata yang sulit mencapai ketepatan tembakan, apalagi bila waktu latihan menembak dan jumlah peluru yang diberikan sangat sedikit. Prajurit profesional harus berlatih menembak sekurangnya 150 butir peluru pada setiap waktu latihan. Apabila jatah peluru kurang dari norma standar tersebut maka jangan mengharapkan prajurit TNI bisa mahir dan cakap menembak di medan pertempuran. Kesiapan perorangan dan kelengkapan peralatan tempur bagi prajurit Korem 121/ABW juga harus dipenuhi, karena moril prajurit akan tinggi dan penuh percaya diri apabila senjata dan peralatan pelengkap lainnya siap untuk tugas operasional.

Langkah kedua, perlu peningkatan kemampuan prajurit. Peningkatan kemampuan harus ditempuh melalui program latihan tiap tahun yang terencana, terarah dan berlanjut. Program latihan standarisasi (Proglatsi), mulai dari tingkat perorangan, tingkat satuan sampai dengan antara satuan dan antar angkatan, perlu, dilaksanakan melalui program terpadu dan jelas

sasarannya. Pada dasarnya, untuk kesiapan operasional satuan, dari Proglatsi tersebut harus diarahkan untuk dapat membekali prajurit dengan minimal 4 kemampuan, yakni kemampuan intelijen, tempur, pembinaan teritorial dan dukungan.

Kemampuan intelijen merupakan kemampuan dasar dan khusus bagi setiap prajurit. Setiap prajurit sekurang-kurangnya harus dapat menjadi pengumpul keterangan, menjadi mata dan telinga pada sektor terdepan serta mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini.

Kemampuan yang perlu ditingkatkan dalam lingkup bidang intelijen ini adalah kemampuan melakukan penyelidikan, pengaman dan penggalangan di daerah sasaran. Satuan prajurit intelijen harus dapat melakukan penyamaran dan pengelabuan identitas dalam tugas-tugas penyelidikan tentang keberadaan lawan, maupun rencana-rencana lawan. Dalam kegiatan pengamanan baik terhadap diri, pimpinan satuan dan rencana-rencana operasi, prajurit harus memegang teguh rahasia militer. Usaha penggalangan masa dan propaganda kepada lawan atau simpatisan musuh harus dilakukan secara hati-hati, karena tidak mustahil bisa memukul dan membahayakan pasukan sendiri.

Dalam membekali dan me-

ningkatkan kemampuan tempur prajurit, yang paling penting di sini adalah melatih kesiapan fisik dan ketrampilan menggunakan seluruh peralatan tempur yang menjadi tanggung jawabnya. Korps infanteri harus menguasai senjata perorangan dan memiliki kepandaian bertempur jarak dekat. Prajurit kavaleri, di samping ketrampilan menggunakan senjata perorangan laras panjang dan pendek, juga dituntut harus mahir menembakkan meriam tank serta taktik dan manuvernya. Bila ukuran keberhasilan prajurit artileri adalah keberhasilan dalam pelatihan menembak jarak jauh dengan meriam dan perkenaan pada sasaran. Medan Kalimantan Barat relatif tertutup oleh hutan lebat dan sedikit jalan pendekat yang bisa digunakan oleh pasukan meriam. Oleh sebab itu, meriam kaliber kecil dan sedang antara 40 – 60 mm relatif masih efektif digunakan untuk membantu tembakan bagi operasi penyerangan yang dilakukan oleh batalyon-batalyon infanteri.

Satuan Artileri medan yang dimiliki Korem baru satu batalyon, sehingga membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Satuan artileri pertahanan udara juga sangat diperlukan, hanya saja sampai saat ini belum diisi. Satuan ini berperan untuk menangkis serangan udara lawan, dengan berusaha menembak jatuh atau

menggagalkan pemboman dan *strafing* yang dilakukan oleh pesawat-pesawat udara lawan yang ingin menghancurkan daerah atau objek-objek vital dan pasukan.

Pada dasarnya, peningkatan kemampuan tempur Korem 121/ABW beserta seluruh jajaran satuan tempur dan satuan bantuan tempurnya harus dapat diintegrasikan dan disinergikan. Dalam hal mempertahankan wilayah Kalbar, pelibatan rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja.

Korem memiliki satuan-satuan bantuan administrasi (Satbanmin) yang berfungsi memberikan dukungan terhadap segala kebutuhan operasi. Kebutuhan logistik perang dan administrasi, yang meliputi bahan-bahan pangan, amunisi, kesehatan, perlengkapan lapangan dan lain-lain, harus tersedia dan disiapkan untuk mendukung keperluan perang. Kemampuan dukungan ini harus disiapkan dan dilatihkan. Sekalipun kemampuan dasar untuk mendukung logistik sudah diberikan tatkala prajurit tersebut dididik di lembaga pendidikan, *adjustmentnya* di lapangan harus disesuaikan dengan keadaan medan, cuaca dan kemampuan musuh, yang bisa mengganggu dan menghadang setiap saat.

Dukungan operasi di daerah pedalaman dan perbatasan Kal-

bar memiliki metoda taktik dan teknik tersendiri; sebagai contoh, untuk memindahkan atau mendorong logistik dari daerah belakang ke depan maka tidak mungkin menggunakan alat angkut reguler dan konvensional, tetapi harus menggunakan tenaga manusia, yang disebut *patok* dari kampung ke kampung. Beras, lauk pauk, amunisi, peluru, granat, bahan peledak dan alat-alat tenda tidak mungkin diangkat dengan menggunakan mobil truk dan kereta kuda, karena medan yang dilalui cukup berat dan belum ada jalan-jalan pendekat secara memadai.

Di sinilah fakta membuktikan bahwa TNI dalam melaksanakan tugas operasi tidak mungkin berjalan sendiri dan tanpa bantuan rakyat. Masyarakat pedalaman Kalbar, sejak Dwikora 1963 hingga operasi penumpasan PGRS/Paraku 1970, sudah banyak sekali memberikan andilnya bagi kepentingan tugas TNI/ABRI dan kepada negara. Tugas membela negara yang berupa kebersamaan ini adalah salah satu ciri khas Sishanta.

Sebagai sebuah komando teritorial, maka kemampuan membina teritorial harus bisa lebih profesional. Fungsi pembinaan teritorial yang profesional adalah tidak mencampuri urusan program pembangunan daerah secara substansial dan tidak mema-

sukkan unsur-unsur kepentingan politik praktis, politik aliran, partai dan lain-lain ke dalam kegiatan TNI.

Dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, terdapat tugas-tugas operasi militer selain perang. Tugas ini menjadi perhatian dan sekaligus mendorong upaya untuk mencari metode pembinaan teritorial yang tepat. Klausul pada pasal 7 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa TNI harus dapat melaksanakan usaha-usaha "memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta", serta harus mampu "membantu tugas-tugas pemerintahan di daerah". Dua ayat tersebut sudah menggambarkan adanya tugas bahwa TNI harus mampu melakukan pemberdayaan wilayah dan membantu terselenggaranya pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tujuan pembinaan teritorial tidak lain adalah menciptakan ruang, alat dan kondisi juang untuk dapat didayagunakan pada saatnya nanti serta membantu dan memperlancar tugas-tugas TNI dalam sistem pertahanan semesta ketika negara dalam keadaan darurat atau perang.

Fungsi pembinaan teritorial inilah yang sering mendapat so-

rotan tajam dari beberapa kalangan, bahkan ada kekhawatiran disalah gunakan oleh TNI untuk kepentingan kekuasaan seperti zaman orde baru. TNI akan menanggung resiko yang besar, terutama pada citranya, apabila berani masuk pada paradigma tersebut.

Pembinaan teritorial bukanlah tugas yang khayal atau sengaja diada-adakan dengan rekayasa tertentu, tetapi memang menjadi keyakinan dan harus dilaksanakan pada masa damai, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, guna menunjang kepentingan negara di dalam konsepsi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Keberatan-keberatan atau keraguan masyarakat tidak perlu dibesar-besarkan dan dikhawatirkan karena objek pembinaan sudah jelas, yaitu sumber daya nasional di mana pengelolannya secara penuh ada pada pemerintahan sipil di daerah sebagaimana amanat undang-undang tentang otonomi daerah.

Apa yang dilakukan oleh TNI untuk memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya alam, buatan, sarana dan prasarana untuk kepentingan pertahanan, pada hakikatnya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya. Oleh karena itu yang dibutuhkan oleh Pemda dari TNI

hanyalah informasi, masukan dan persyaratan-persyaratan yang terkait dengan kepentingan pertahanan negara. Untuk itu, Korem dapat membantu proses perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan pada hasil-hasil pembangunan, terutama yang terkait dengan ruang, alat dan kondisi juang tersebut. Peranan TNI akan terasa relatif dominan dan dibutuhkan di daerah-daerah apabila RUU tentang komponen cadangan dan komponen pendukung telah disahkan menjadi undang-undang, karena di sana ada upaya-upaya nyata dalam rangka sosialisasi, internalisasi dan rekrutmen untuk membangun kekuatan cadangan TNI yang bersumber dari rakyat di mana rekrutmen itu dilakukan. Kegiatan pembinaan teritorial tidak akan pernah berhenti, karena sifatnya yang terus berkesinambungan.

Langkah ketiga, perlunya perbaikan kesejahteraan prajurit. Semua orang tahu bahwa gaji prajurit itu rendah dan bahkan kurang manusiawi. Satu-satunya pegawai negeri atau aparat negara yang wajib dan bersedia ditugaskan di mana saja di seluruh Indonesia atau di luar negeri adalah TNI, serta harus sanggup mati karena tugas negara tersebut; kata populernya adalah berani "tekan kontrak mati". Hal ini yang tidak terjadi dan tidak ma-

suk persyaratan bagi pegawai negeri sipil atau swasta lainnya. Penekanan terhadap persyaratan tersebut biasa tidak diketahui dan diabaikan oleh pejabat dan para pengambil keputusan; lebih sengsaranya jiwa prajurit tersebut tidak diasuransikan. Apabila gugur dalam tugas, maka prajurit cukup disemayamkan, dimakamkan dan didoakan begitu saja, dan tidak ada lagi imbalan-imbalan penghargaan ataupun jaminan kepada anak istri yang ditinggalkan. Sebagai negara merdeka dan bangsa yang menjunjung tinggi hak azasi manusia, seharusnya hal ini menjadi perhatian dan kemudian menjadi kebijakan pemerintah yang bisa membanggakan dan memberikan harapan bagi kehidupan keluarga prajurit yang ditinggalkan.

Kesejahteraan prajurit TNI kini menjadi semakin dilematis, baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Kesejahteraan yang bersifat materiil dari pemerintah belum bisa bertambah secara signifikan, terutama penghasilan bulanan yang berupa gaji, lauk pauk dan tunjangan lainnya. Paling tinggi penambahan pertahunnya hanya berkisar 10 - 20% dari gaji pokok, sementara inflasi dan harga-harga kebutuhan sehari-hari terus membumbung tinggi menjauhi daya beli. Keadaan ini tidak terlepas

dari sumbernya, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun yang cenderung bertahan stagnan. Anggaran pertahanan negara yang hanya berkisar kurang dari 1% produk domestik bruto (PDB) untuk menutup semua kebutuhan baik, yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan kekuatan, tampaknya akan sulit dan tidak mungkin terpenuhi.

Pada sisi lain, undang-undang dan tuntutan reformasi TNI mengamanatkan bahwa semua bisnis TNI harus dihapuskan dan diserahkan kepada pemerintah. Hasilnya mungkin pada 2009 ketika semua program pengalihan bisnis TNI selesai diverifikasi dan diserahkan kepada pemerintah. Sekalipun mungkin dahulu ada penyimpangan-penyimpangan dari apa yang dioperasikan oleh badan usaha milik TNI, beberapa kebutuhan materiil TNI yang tidak mampu didukung oleh APBN telah ditutup oleh dana hasil bisnis tersebut untuk kepentingan satuan-satuan TNI. Kesejahteraan materiil secara kolektif untuk prajurit, walaupun tidak besar, seperti tunjangan hari raya, bantuan sekolah (beasiswa) dan bantuan kemalangan/musibah, masih bisa diberikan dari hasil usaha-usaha tersebut. Apabila semua bisnis itu dicabut dan dilepaskan pengelolaannya dari ta-

ngan TNI, maka selayaknya harus ada kompensasi yang seimbang dan lebih dari APBN untuk menutup kebutuhan tersebut. Hal inilah yang belum bisa dilakukan oleh pemerintah dan menjadi sesuatu yang dilematis bagi TNI.

Pemerintah selalu berbicara bahwa reformasi internal dalam tubuh TNI harus berjalan dan berhasil, tetapi tidak memberikan jalan keluar atau solusi dari berbagai kendala yang dihadapi TNI. Kesulitan masalah peningkatan kesejahteraan prajurit ini dirasakan di seluruh angkatan dan sampai ke daerah-daerah. Korem 121/ABW terus berusaha menjaga, memelihara disiplin prajurit serta konsisten pada tugas pokoknya, tidak terpengaruh oleh tarikan-tarikan politik, bisnis swasta dan lain-lain dalam rangka mempertahankan citranya yang sudah baik.

Usaha peningkatan kesejahteraan materiil yang bisa ditempuh secara legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang adalah pengembangan peranan koperasi satuan yang disebut Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad). Koperasi ini telah ada dan dikembangkan oleh satuan-satuan angkatan darat di seluruh Indonesia sejak Indonesia merdeka. Peningkatan usaha Primkopad di tingkat Korem, Kodim, Batalyon dan lem-

baga- lembaga TNI AD lainnya bisa melalui metoda penyuntikan modal dan tambahan sarana operasional agar dapat berkembang dengan pesat. Kebutuhan pokok sehari-hari yang ada di Primkopad dapat ditambah dan diusahakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang primer atau sekunder bagi keluarga prajurit.

Model *cash flow* koperasi ini sebenarnya akan kredibel dan terjamin aman, karena proses pembayarannya melalui pemotongan gaji prajurit yang bersangkutan pada tiap bulan. Berkaitan dengan model belanja atau pinjaman kepada koperasi tersebut, perlu mewas anggota yang tidak mampu mengendalikan diri dan cenderung boros yang dapat berakibat terlilit hutang kepada koperasi.

Secara non materiil kesejahteraan prajurit ditingkatkan melalui interaksi sosial dan pencerahan-pencerahan agama. Interaksi sosial antara sesama prajurit para atasan harus harmonis serta memberikan nuansa kesejukuan, sehingga prajurit akan merasa memiliki satuan tersebut, merasa diayomi dan akan mengayomi satu sama lain. Ceramah-ceramah agama, tata susila dan tata krama dilakukan pada waktu luang agar tercipta hubungan yang saling menghargai dan saling tolong menolong. Hakikat

prajurit sejahtera adalah prajurit yang terpenuhi kebutuhan hidupnya secara lahir dan batin. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi setiap pimpinan pasukan dan institusi TNI untuk selalu memikirkan dan mencari solusi terbaik dalam usaha meningkatkan kesejahteraan tersebut.

Saran

Payung hukum yang berupa undang-undang dan Peraturan Pemerintah sangat diperlukan. Payung hukum akan digunakan untuk upaya pemberdayaan wilayah dalam rangka kepentingan pertahanan; secara lebih jauh adalah untuk kepentingan pembangunan sistem maupun kekuatan (*system and force building*) yang harus dilakukan sejak dini, terutama dalam masa damai. Oleh sebab itu, disarankan agar upaya menuntaskan (menggolkan) RUU tentang Kamnas, RUU tentang komponen cadangan dan komponen pendukung serta RUU tentang wajib militer harus bisa diselesaikan lebih dulu.

Fokus perhatian tentang pembangunan dan pengamanan daerah perbatasan antara Kalbar dan Malaysia (Serawak) selayaknya tidak lagi hanya bersifat kampanye dan sekedar konsepsi, tetapi harus menjadi kenyataan dan dimulai dibangun seta-

hap demi setahap. Pembangunan pos lintas batas (PLB) dan penetapan kembali tapal batas negara yang kini telah banyak yang rusak dan bergeser perlu ditangani segera. Demikian pula, pembangunan perekonomian dan kesejahteraan rakyat perbatasan perlu mendapatkan prioritas dan porsi yang seimbang dikembangkan dengan pembangunan di daerah pantai atau perkotaan. Enam konsentrasi atau simpul wilayah pembangunan seperti diuraikan di atas, harus dititik beratkan pada pembangunan pasar, sekolah dan Puskesmas yang akan menjadi simpul wilayah ekonomi (SWE) dan sosial untuk pengembangan kesejahteraan, terutama pada tingkat kecamatan di sepanjang perbatasan.

Keberadaan Korem 121/ABW di Kalbar terbukti masih sangat diharapkan dan diandalkan oleh masyarakat Kalbar. Namun demikian, kinerja Korem masih relatif rendah terutama terhadap tugas-tugas pengamanan perbatasan. Oleh sebab itu, optimalisasi peran Korem perlu ditingkatkan terus melalui pembangunan kekuatan, validasi organisasi serta memperbaiki citra pengabdian kepada bangsa dan peningkatan kesejahteraan prajuritnya, agar senantiasa mendapat dukungan dan partisipasi rakyat dalam rangka mengimplementasikan sistem pertahanan semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul & Samsu Rizal P., 1997, *Upaya Indonesia Menciptakan Ketahanan Regional, Studi Kasus Konflik di Laut China Selatan*, Jurnal Tannas II, UGM, Yogyakarta.
- Buzan, Barry, 1987, *An Introduction to Strategic Studies, Military Technology and International Relations*, First Publisher, Mc. Millan Press, London.
- Buzan, Barry, 1991, *People States & Fear, An Agenda for International Security Studies In the Post Cold War Era*, second edition, Lymne Riener Publisher Inc, Colorado, USA.
- Donald, Thomas Kambill, 1950, *The Indirect Assesment of Social Attitudes Psikologi Bulletin*, London.
- Dephan RI, 2007, *Strategi Pertahanan Negara*, Permenhan RI Nomor: PER/22/M/XII/2007, Jakarta.
- Dephan RI, 2007, *Postur Pertahanan Negara*, Permenhan RI Nomor: PER/24/M/XII/2007, Jakarta.
- Dephan RI, 2007, *Doktrin Pertahanan Negara*, Permenhan RI Nomor: PER/23/M/XII/2007, Jakarta.
- Dephan RI, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Permenhan RI Nomor: PER/03/

- M/II/2008, Jakarta.
- Dafri, Agus Salim, 1999, *Perimbangan Kekuatan Militer di Asia Pasifik Pasca Perang Dingin*, Jurnal Sosial Politik Vol-3, UGM, Yogyakarta.
- Engardio, Pete, 2007, *Chindia How China and India are Revolutionizing Global Business*, The Mc Grow - Hill Companies, New York .
- Eko, Indrajid, 2007, *Strategi Pengembangan Informasi dan Komunikasi di Indonesia Menuju Kemandirian*, Orasi Ilmiah, UPN "Veteran", Yogyakarta.
- Guttman, Lewis, 1944, *A basic for scaling kualitatif data*, American Socio Logical, Review, USA.
- Hirst, Paul, 2004, *War and Power in the 21st Century*, Murai Kencana, Jakarta.
- Judith, Large and Timothy D. Sisk, 2006, *Democracy, Democracy conflict and Human Security, Pursuing peace in the 21st. Century*, Stock Holm - Sweden.
- Kolodziej, Edward A., 2005, *Security and International Relations*, New York.
- Komisi I/ /DPR RI, 2005, *Laporan Kunjungan Kerja Komisi I/ DPR RI, ke daerah Prop. Kalbar 2005*, Jakarta.
- LL. Thurstone dan Ej. Lhave, 1929, *The Measurement of attitude*, University of Chicago, Chicago - USA.
- Likert, Rensis, 1932, *A Technique for the measurement of attitudes*, Archive of psychology, No. 140, USA.
- Navarro, Peter, 2006, *The Coming China Wars, Where They will be Fought and How they can be Won*, FT Press, New Jersey.
- Nasution, Abdul Haris, 1970, *Fundamentals of Guerrilla warfare*, second edition, PT. Seruling Masa, Jakarta.
- O' Houlon, Michael, 2000, *Technological Change and The Future of Warfare*, Bookings Institution, Washington DC, USA.
- Poloma, Margaret M., 2003, *Sosiologi Kontemporer*, Edisi Indonesia cetak I, Jakarta.
- Purbo, S. Suwondo, Letjen TNI (Purn), 2006, *Kumpulan Bacaan terpilih tentang Perang, Damai dan Strategi (Jilid I & II)*, Jakarta.
- Pascasarjana UGM, 2003, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta
- Paul, Bill, 2007, *Future Energy, How the New Oil Industry will Change People Politics and Port Folios*, John Wiley and son's Inc, Canada.
- Roberts, Adam, 1986, *Nation in*

- Arm the Teory and Practice of Territorial Defence*, (Fordward by Mc. George Bundy), second revised and enlayed edition, New York.
- Robert, P. Gwinn, *The Encyclopedia Britanica inc*, 1974, 1993, menyebutkan Indonesia sebagai "the Largest Archipelago Country in the World" disebut pula sebagai "The Archipelago Continent", 15th Edition, Chicago, USA.
- Stiglitz, Joseph E, 2002, *Globalization and Its Discontents*, First Editions, Penguin Group, London.
- Stiglitz, Yoseph E, 2008, *Belajar dari Pengalaman Irak*, proyeck Syadicate, Culombia University, USA.
- Saaty, Thomas L, 1994, *Foundamentals of Decesion Making and Priority Theory With The Analytic Hierarchy Process*, Vol - VI First Edition, RWS Publication, Pittsburg.
- Setneg, 1998, *Risalah Sidang Bidang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, PPKI, Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PT. Widya Komputer Indonesia, Jakarta.
- Simmel, George, 2004, *Problem Modernitas Dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan*, edisi Indonesia, Cindelarar, Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- Swasono, Sri Edi, 2007, *Indonesia in not for sale, Sistem Ekonomi Nasional untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*, Makalah Seminar dengan Thema: Revitalisasi Wawasan Nasional dan Pemantapan Jati Diri Bangsa Dengan Pemberdayaan Moral Pancasila Dalam Menjamin Integritas NKRI, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.
- Suryohadiprodo, Sayidiman, 2007, *Sivis Pacem Para bellum*, Jakarta.
- Seskoad, *Vademicum*, 1984, Bandung.
- SKH, *Kompas*, tanggal 21 - 7 - 2004, tanggal 24 - 8 - 2004, tanggal 3 - 9 - 2004.
- SKH, *Media Indonesia*, tanggal 8 - 8 - 2004, Jakarta.
- Waseso, Mulyadi Guntur, 1985, *Dimensi-Dimensi Psykhologi Sosial*, Yogyakarta.
- Yahya, A. Muhaimin, 2006, *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, UGM, Yogyakarta.